

**PROBLEMATIKA PERGANTIAN KURIKULUM PAI YANG BERULANG:  
DAMPAKNYA TERHADAP KESIAPAN GURU DAN SEKOLAH**

**Devi Fatwanti, Halimah Tussadiah , Ukasyah Ihsani, Aisha Cahya Jelita, Faisal Hadi,  
Ibnu Saiful, Sulis Arieyati, Ammar Ahsan, Siti Aslina, Fathir Amardjati**

Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Universitas Islam Depok

Email: [devifatwanti@uidepok.ac.id](mailto:devifatwanti@uidepok.ac.id) , [htussadiah@gmail.com](mailto:htussadiah@gmail.com), [ukasyahihsani717@gmail.com](mailto:ukasyahihsani717@gmail.com),  
[aishajelita22@gmail.com](mailto:aishajelita22@gmail.com), [hadifasial165@gmail.com](mailto:hadifasial165@gmail.com), [ibnumhmd005@gmail.com](mailto:ibnumhmd005@gmail.com), [sulisarieyati@gmail.com](mailto:sulisarieyati@gmail.com),  
[amarahsan29@gmail.com](mailto:amarahsan29@gmail.com), [sitirukoyahlinah@gmail.com](mailto:sitirukoyahlinah@gmail.com),  
[Fathiramar25@gmail.com](mailto:Fathiramar25@gmail.com),

**Abstrak**

Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia terjadi berulang kali dalam kurun waktu yang relatif singkat, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan satuan pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji problematika yang ditimbulkan oleh pergantian kurikulum PAI yang berulang serta dampaknya terhadap kesiapan guru dan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. Melalui kajian literatur terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan, ditemukan bahwa guru PAI masih menghadapi kendala dalam hal adaptasi pedagogis, penguasaan administrasi pembelajaran, dan keterbatasan sarana pendukung berbasis teknologi. Di sisi sekolah, kesiapan kelembagaan kerap tidak seimbang dengan kecepatan perubahan kebijakan kurikulum. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pendekatan implementasi yang lebih bertahap, pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil guru, serta dukungan infrastruktur yang merata hingga ke daerah-daerah terpencil.

Kata kunci: kurikulum merdeka, guru PAI, kesiapan guru, pergantian kurikulum, problematika implementasi

**Abstract**

Curriculum changes in Indonesian education have occurred repeatedly within relatively short periods, ranging from the Competency-Based Curriculum (KBK), the School-Based Curriculum (KTSP), the 2013 Curriculum, to the Merdeka Curriculum. This situation creates distinct challenges for Islamic Religious Education (PAI) teachers and educational institutions. This article aims to examine the problems caused by repeated PAI curriculum changes and their impact on the readiness of teachers and schools in implementing the applicable curriculum. Through a literature review of relevant research findings, it was found that PAI teachers still face obstacles in pedagogical adaptation, mastery of learning administration, and limited technology-based support facilities. At the school level, institutional readiness is often not commensurate with the pace of curriculum policy changes. These findings imply the need for a more gradual implementation approach, continuous and real-needs-based teacher training, and equitable infrastructure support extending to remote areas.

Keywords: merdeka curriculum, PAI teachers, teacher readiness, curriculum change, implementation problems

## **PENDAHULUAN**

Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan suatu negara. Ia bukan sekadar dokumen tertulis, melainkan cerminan dari visi dan arah yang ingin dicapai oleh sebuah bangsa melalui proses pendidikannya. Di Indonesia, perubahan kurikulum telah berlangsung berkali-kali—dari Rencana Pelajaran 1947, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, hingga yang terbaru yakni Kurikulum Merdeka. Masing-masing perubahan membawa semangat pembaruan, namun juga membawa konsekuensi berupa beban adaptasi yang tidak ringan bagi para pelaksana di lapangan, terutama para guru.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berada di garis terdepan dari setiap pergantian kurikulum ini. Mereka tidak hanya dituntut memahami konten materi keagamaan yang menjadi bidang keahliannya, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan pendekatan, metode, dan sistem penilaian yang dibawa oleh setiap kurikulum baru. Perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka, misalnya, membawa pergeseran yang cukup fundamental: dari pendekatan berbasis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) menuju Capaian Pembelajaran (CP) yang kemudian diturunkan menjadi Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Pergeseran ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi menyentuh cara guru memandang dan merancang proses pembelajaran secara menyeluruh.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa di balik semangat pembaruan yang dibawa setiap kurikulum baru, terdapat problematika nyata yang dihadapi guru dan sekolah. Utari (2022) mencatat bahwa guru PAI masih menghadapi hambatan signifikan dalam menghadapi Kurikulum Merdeka, mulai dari ketidaksiapan konseptual hingga keterbatasan infrastruktur. Ubaidillah (2024) menemukan bahwa di daerah terpencil seperti Jayawijaya Papua, persiapan implementasi Kurikulum Merdeka terhambat oleh minimnya pengalaman belajar siswa, rendahnya kesadaran belajar, dan sulitnya akses internet. Sementara Mawardhani dan Mutiara (2025) membuktikan secara kuantitatif bahwa baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi profesional guru PAI, meski juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses adaptasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi problematika yang dihadapi guru PAI dalam menghadapi pergantian kurikulum yang berulang,

(2) mengkaji dampak pergantian kurikulum tersebut terhadap kesiapan sekolah sebagai institusi, dan (3) merumuskan implikasi bagi kebijakan implementasi kurikulum yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal pendidikan nasional yang terindeks, dengan fokus pada topik problematika implementasi kurikulum PAI di Indonesia. Tiga sumber utama yang menjadi basis analisis adalah: (1) Utari, M. (2022) tentang problematika guru PAI dalam menghadapi Kurikulum Merdeka yang diterbitkan dalam jurnal *Al-Mau'izhoh*; (2) Ubaidillah, A. (2024) tentang problematika guru PAI berbasis komunitas dalam persiapan implementasi Kurikulum Merdeka di MTs Negeri Jayawijaya Papua, diterbitkan dalam jurnal *Dirasah*; dan (3) Mawardhani, K.A. & Mutiara, D. (2025) tentang pengaruh penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka terhadap kompetensi profesional guru PAI tingkat SD, diterbitkan dalam jurnal *Fondatia*.

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul secara berulang di ketiga sumber tersebut, kemudian melakukan sintesis lintas sumber untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan temuan. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih komprehensif tentang problematika yang dihadapi guru PAI dan sekolah dalam menghadapi pergantian kurikulum, sekaligus membuka ruang untuk merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Problematika Guru PAI dalam Menghadapi Pergantian Kurikulum**

Kajian lintas sumber menemukan setidaknya empat klaster problematika utama yang dihadapi guru PAI ketika berhadapan dengan pergantian kurikulum.

#### **a. Adaptasi Peran Pedagogis**

Kurikulum Merdeka menuntut pergeseran peran guru dari sosok yang mendominasi (teacher-centered) menjadi fasilitator yang berpusat pada peserta didik (student-centered). Bagi guru-guru yang telah terbiasa dengan pola mengajar konvensional selama bertahun-tahun, perubahan ini tidaklah mudah. Arifiani & Umami (2023, dalam Ubaidillah, 2024) menemukan

bahwa guru sudah terbiasa dengan gaya mengajar kurikulum lama, dan untuk mengubah kebiasaan tersebut dibutuhkan proses, waktu, dan kemauan belajar yang tinggi. Di sisi lain, tuntutan Kurikulum Merdeka agar guru mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi menambah kompleksitas tantangan yang harus dihadapi.

#### **b. Pemahaman dan Penguasaan Administrasi Kurikulum**

Salah satu perubahan paling mendasar dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka terletak pada sistem perencanaan pembelajaran. Jika sebelumnya guru bekerja dengan kerangka KI-KD yang relatif sudah tersedia, kini mereka harus mampu menerjemahkan Capaian Pembelajaran (CP) menjadi Tujuan Pembelajaran (TP) dan kemudian merancang Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) secara mandiri. Mawardhani dan Mutiara (2025) mencatat bahwa banyak guru mengalami kesulitan dalam menerjemahkan CP menjadi TP yang spesifik dan terukur, sehingga terjadi ketidakefektifan dalam penetapan capaian pembelajaran. Selain itu, terdapat pula kendala teknis berupa kesulitan mengakses platform digital Merdeka Mengajar, khususnya bagi guru-guru yang memiliki keterbatasan literasi teknologi.

#### **c. Keterbatasan Pelatihan yang Relevan dan Efektif**

Pelatihan yang tersedia bagi guru dalam rangka implementasi kurikulum baru seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Alimuddin (2023, dalam Ubaidillah, 2024) mencatat bahwa pelatihan lebih banyak dilakukan secara daring melalui platform Merdeka Mengajar, padahal para guru justru membutuhkan pelatihan tatap muka yang memungkinkan mereka mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Akibatnya, guru terpaksa belajar secara mandiri dengan kompetensi dan sarana yang terbatas, sementara tuntutan implementasi kurikulum terus berjalan.

#### **d. Kesenjangan antara Harapan Kurikulum dan Realitas Peserta Didik**

Problematika yang paling fundamental dan seringkali terabaikan dalam wacana pergantian kurikulum adalah kesenjangan antara kompetensi yang ditargetkan oleh kurikulum dengan kemampuan aktual peserta didik. Ubaidillah (2024) mendeskripsikan kondisi ekstrem yang ditemukan di MTs Negeri Jayawijaya: peserta didik kelas VII (yang seharusnya berada di Fase D) bahkan belum dapat membaca Al-Qur'an dengan lancar—sebuah kompetensi yang seharusnya sudah dikuasai sejak tingkat MI. Kondisi ini membuat guru PAI berada dalam dilema: menerapkan kurikulum sesuai fase atau menyesuaikan dengan realitas kemampuan peserta didik.

## **2. Dampak terhadap Kesiapan Sekolah sebagai Institusi**

Pergantian kurikulum tidak hanya berdampak pada individu guru, tetapi juga menguji kesiapan sekolah secara institusional. Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber yang dianalisis, setidaknya terdapat tiga dimensi kesiapan sekolah yang terdampak.

Pertama, kesiapan infrastruktur digital. Kurikulum Merdeka dirancang dengan asumsi bahwa sekolah memiliki akses internet yang memadai untuk mengakses platform Merdeka Mengajar dan aplikasi Sikurma (khusus madrasah). Namun, realitas di lapangan jauh dari asumsi tersebut. Di MTs Negeri Jayawijaya, ketidakstabilan jaringan internet menjadi hambatan serius bagi guru dalam mengakses sumber belajar maupun menyelesaikan administrasi akademik digital (Ubaidillah, 2024). Hal serupa ditemukan di SDN 74 Pontianak (Maulida dkk., 2023, dalam Ubaidillah, 2024), di mana jangkauan wifi yang terbatas menghalangi proses pembelajaran.

Kedua, kesiapan sumber daya manusia. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa rata-rata skor Ujian Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 hanya berada di angka 50,64 poin (Mawardhani & Mutiara, 2025). Angka ini mencerminkan bahwa secara rata-rata, kompetensi guru Indonesia masih berada di bawah ambang yang diharapkan, bahkan sebelum tuntutan adaptasi kurikulum baru ditambahkan. Kondisi ini menjadi tantangan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan jangka pendek.

Ketiga, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan/terpencil. Kajian ini menemukan pola yang konsisten: sekolah di daerah terpencil menghadapi hambatan berlapis yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekolah di perkotaan. Mereka tidak hanya kekurangan akses internet, tetapi juga terbatas dalam hal ketersediaan guru yang kompeten, bahan ajar, dan dukungan komunitas orang tua. Dengan kata lain, satu kebijakan kurikulum yang seragam diterapkan pada kondisi-kondisi yang sangat tidak seragam.

## **3. Implikasi bagi Kebijakan Implementasi Kurikulum**

Temuan dari kajian ini mengimplikasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan implementasi kurikulum ke depan. Pertama, implementasi kurikulum baru perlu dilakukan secara bertahap dan disertai mekanisme dukungan yang sistematis, bukan sekadar pelimpahan tanggung jawab adaptasi kepada guru dan sekolah. Mawardhani dan Mutiara (2025) mengingatkan bahwa banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai Kurikulum 2013 sudah dihadapkan pada tuntutan implementasi Kurikulum Merdeka—sebuah kondisi yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran di kelas.

Kedua, pelatihan guru perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar sosialisasi dokumen kurikulum. Pelatihan tatap muka yang memberikan ruang dialog antara guru dan narasumber terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan daring yang bersifat satu arah. Ketiga, perlu ada kebijakan afirmatif yang memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terpencil) mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dalam proses implementasi kurikulum, mengingat tantangan yang mereka hadapi jauh lebih kompleks.

## **KESIMPULAN**

Pergantian kurikulum PAI yang berulang di Indonesia menimbulkan problematika berlapis bagi guru dan sekolah. Dari sisi guru, tantangan utama meliputi adaptasi peran pedagogis, penguasaan administrasi kurikulum baru, keterbatasan pelatihan yang relevan, serta kesenjangan antara target kurikulum dan realitas peserta didik. Dari sisi sekolah, kesiapan institusional terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital, kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dan ketimpangan yang signifikan antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil.

Meskipun Kurikulum Merdeka terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi profesional guru PAI (Mawardhani & Mutiara, 2025), dampak positif ini tidak dapat diraih tanpa proses adaptasi yang membutuhkan waktu, dukungan, dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum baru tidak semata-mata bergantung pada kualitas dokumen kurikulumnya, melainkan sangat ditentukan oleh ekosistem pendukungnya: pelatihan guru yang efektif, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang sensitif terhadap keberagaman konteks sekolah di seluruh Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifiani, I. K., & Umami, N. (2023). Problematika Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(8), 872–878.
- Erdiansyah, Joharni, & Ariani, E. K. (2022). Problematika Madrasah Pilot Project Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah se-Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal of Islamic Education, HEUTAGOGIA*, 2(2), 121–134.
- Mawardhani, K. A., & Mutiara, D. (2025). Pengaruh Penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan

Agama Islam Tingkat Sekolah Dasar. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(1), 22–41.  
<https://doi.org/10.36088/fondatia.v9i1.5590>

Nisa, K. (2023). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum: Antara KBK, KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 118–126.

Pillawaty, S. S., dkk. (2023). Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, 1, 602–611.

Ubaidillah, A. (2024). Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Berbasis Komunitas dalam Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka di MTs Negeri Jayawijaya Papua. *Dirasah*, 7(1), 306–314.

Utari, M. (2022). Problematika Guru PAI dalam Menghadapi Kurikulum Merdeka pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Mau'izhoh*.  
<https://doi.org/10.31949/am.v4i2.4500>